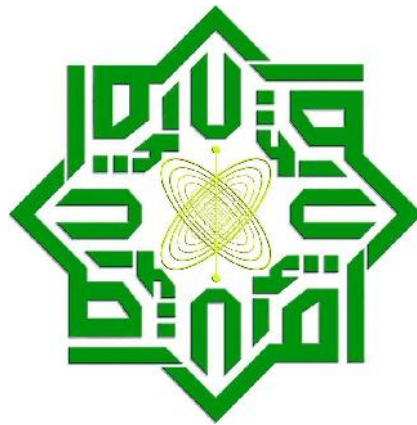


SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HOTEL DI KABUPATEN KAMPAR**



Disusun oleh :

MELDA YANI
NIM. 10873004437

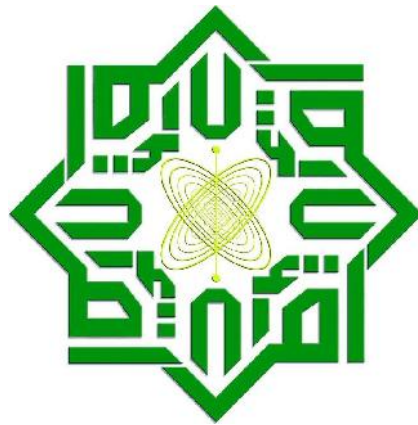
**JURUSAN AKUNTANSI S 1
KONSENTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2012**

**PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK
HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HOTEL DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive*

*Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun oleh :

MELDA YANI
NIM. 10873004437

**JURUSAN AKUNTANSI S1
KONSENTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2012

ABSTRAKS

PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh : MELDA YANI

NIM : 10874004437

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang berlangsung pada bulan Februari samapi april 2012. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitan ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan pajak hotel (simultan) pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sedangkan mamfaat yang didapat adalah memberi masukan bagi bagi kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pajak hotel.

Populasi dari penelitian ini adalah beberapa perwakilan dari pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive random sampling. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepal dinas, sekretaris, serta struktur bagian-bagian yang termasuk dalam kantor dinas tersebut dengan total sampel keseluruhan sebanyak 36 orang pegawai yang secara langsung menjadi objek penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial masing-masing variabel efektivitas pelaksanaan pelaksanaan pemungutan pajak hotel, efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar.

Saran yang diambil dari hasil penelitian adalah Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk lebih memaksimalkan lagi mensosialisasikan dan menggali potensi yang ada di Kabupaten Kampar terutama Pajak Hotel agar tidak terjadi kebocoran lago.

Kata Kunci : Efektivitas pelaksanaan, Efektivitas Pengawasan pemungutan pajak Hotel, pendapatan hotel.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KAMPAR “**

Tugasakhirinidisusununtukmemenuhipersyaratanakademisuntukmemperole hgelarSarjanaEkonomiJurusanAkuntansipadaFakultasEkonomiUniversitas Islam Indonesia.Penulismenyadaribahwadalampenulisanskripsiini, masihbanyakkelemahandankekurangan yang disebabkanolehketerbatasanpengetahuandanpengalamanpenulis.Namundenganban yaknyapihak yang memberikanbantuansertadukungannya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiini.Untukitu, padakesempataninidengankerendahanhatipenulismengucapkanterimakasihkepada:

1. Teristimewa teruntuk Ayahanda **H.AZAINI** dan Ibunda tercinta **Hj.RAHMI** terimakasih atas do'a,dukungan Moril dan Non materil ayah dan bunda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima Kasih untuk Kakak/ipar **AFNI ZARTI / FERI ZALDI** dan **AFNA DEWI / M.RIDWAN** serta adik-adikku **NURFADILAH** dan **MHD**

ILHAM dan Ponakanku **Zahida zahwa, Syafa Z.A dan M. Habib AL Rizki**

serta Seluruh keluarga tercinta yang telah banyak melimpahkan perhatian, pengertian, kasih sayang, nasehat bimbingan dan dorongan baik yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap tegar dan tabah dalam menuntut ilmu.

3. Bapak **Prof. DR. H. M. Nazir** selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas yang kita cintai ini.
4. Bapak **DR. Mahendra Romus, SP, M. E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak **Nasrullah Djamil, SE, M. Si,** selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Ade Ria Nirmala, SE, MM** selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberi masukan terhadap penulis.
7. Ibu **Desrir Miftah, SE, MM** selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada mahasiswa dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu yang selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Kepala **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar** beserta seluruh pegawainya. Terima kasih atas waktu, kesempatan serta bantuan sehingga penulis melaksanakan penelitian ini.
10. **Indra Fani** yang telah banyak memberikan bantuan. Terima kasih buat waktunya, semangat, perhatian dan doronganmu yang telah membukakan jendela kehidupan bagi penulis tentang arti sebuah perjuangan.
11. Terima Kasih untuk semua sahabat-sahabat saya yang sekaligus sahabat yang sama-sama berjuang dan kerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.
Yeyen Kesuma, Restu prayudi, Adriyansyah, Khatib aidul wahid, AL Muslim Qiram, Jumaris, fatimah zahrotul ainy, Eni Khairani khaidir, Werti junita, dan Seluruh Teman – Teman Akuntansi C 2008 (AKACHE FOREVER 08), yang tidak biasa disebutkan satu persatu. Serta teman-teman yang terlibat dalam penulisan skripsi ini merupakan sumber inspirasi yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta semangat kepada penulis.
12. Terima kasih untuk semua teman-teman Akuntansi 08 khususnya Teman-teman yang mengambil **Konsentrasi Perpajakan angkatan 08** yang telah banyak memberi masukan dan arahan mengenai skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk Seluruh teman-teman di FEKONSOS UIN SUSKA RIAU Khususnya Angkatan 2008, **Era Suhartati, Agung Widodo, Zuhraini, Afriyansyah saputra** yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta **Bang Mul** yang sudah menjadi abang angkat sekaligus teman yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama kuliah.

14. Terima kasih untuk Kakak-kakak tingkat khususnya buat Kak **Nur wahyuni** yang telah banyak membantu dan sabar dalam menghadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima Kasih untuk **BuatGank Noin**, kak cinok DeviJulianti.S.sy, kak hongkang Ayu S.sy, kak cinob Yelviana, ocu zetLe dan bebeb putra. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya. Yang rela dengerin keluh kesah penulis.
16. Dan Terima kasih untuk teman-teman KKN. **Ihwan, Hendriawan, Julaini, Yogi Barlian Nasser, Reni Handayani, Mia Ika Ayu Safitri, Nazmi Susanti, Khairil Bariah, Nurmayunita**. Yang telah banyak memberi masukan atas skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baiknya,
Amin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 April 2012

Penulis

MELDA YANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II : LANDASAN TEORI DANPENGEMBANGAN	
HIPOTESIS.....	10
2.1 Pengertian Efektivitas.....	10
2.2 Pengertian Pajak.....	11
2.3 Fungsi Pajak	13
2.4 Cara pengenaan pajak	16
2.5 Pajak Daerah	17
2.5.1 Jenis Pajak Daerah	17
2.5.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	18
2.6 Pajak Hotel	20
2.6.1 Pengertian Pajak Hotel.....	20

2.6.2 Objek Pajak Hotel.....	21
2.6.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel.....	21
2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	22
2.6.5 Ketentuan Pidana Pajak Hotel.....	23
2.6.6 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.....	23
2.6.7 Pendaftaran Pajak Hotel.....	24
2.6.8 Pendataan Pajak Hotel.....	25
2.6.9 Penetapan Pajak Hotel	26
2.6.10 Pembayaran Pajak Hotel.....	27
2.6.11 Angsuran Pajak Hotel	28
2.7 Pengertian Pendapatan	28
2.7.1 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel.....	30
2.7.2 Efektivitas Pengawasan	31
2.7.3 Efektivitas Pelaksanaan	31
2.8 Variabel Pengukuran Dan Pengukuran Variabel	33
2.8.1 Hipotesis	33
2.8.2 Variabel Penelitian	34

BAB III : METODE PENELITIAN 35

3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35

3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	37
3.5 Metode Penelitian Data	37
3.6 Defeenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
3.7 Teknik Analisa Data.....	40
3.7.1 Uji Validasi dan Realibilitas.....	40
3.7.2 Uji Asumsi Klask.....	41
3.7.3 Uji Linier Berganda	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskriptip dan Hasil Penelitian.....	45
4.2 Analisa Efektivitas pelaksanaan.....	47
4.3 Analisa Efektivitas Pengawasan.....	48
4.4Analisa Penerimaan	50
4.5 Analisa Kualitas Data	52
4.5.1 Statistik Deskriptif	52
4.5.2 Uji Validasi dan Uji Reabilitasi	
Efektivitas Pelaksanaan	53
4.5.3 Uji Validasi dan Uji Reabilitas	
Efektivitas pengawasan.....	55
4.5.4 Uji Validasi dan Uji Reabilitas Penerimaan	58
4.6 Uji Normalitas Data.....	62
4.7 Uji Asumsi Klasi.....	64
4.7.1 Uji Multikolinearitas.....	64
4.7.2 Uji Auto Kolerasi.....	65
4.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.8 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	66

4.8.1 Uji T (parsial).....	66
4.8.2 Uji F (Simultan).....	69
4.9 Koefisien Regresi	70
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	74
5.3 Keterbatasan	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Gambaran Umum Responden.....	45
Tabel IV.2 Tanggapan Respon Tentang Efektivitas Pelaksanaan.....	47
Tabel IV.3 Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Pengawasan.....	49
Tabel IV.4 Tanggapan Responden Tentang Penerimaan.....	50
Tabel IV.5 Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
Tabel IV.6 Validasi dan Reabilitasi Efektivitas Pelaksanaan.....	53
Tabel IV.7 Validasi dan Reabilitasi Efektivitas Pengawasan.....	56
Tabel IV.8 Validasi dan Reabilitasi Penerimaan.....	59
Tabel IV.9 Normalitas Data Awal.....	62
Tabel IV.10 Normalitas Data Yang di LN.....	63
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolienaritas.....	64
Tabel IV.12 Hasil Uji Auto Korelasi.....	65
Tabel IV.13 Hasil Uji Park.....	66
Tabel IV.14 Hasil Uji t Parsial efektivitas pelaksanaan	67
Tabel IV.15 Hasil Uji t Parsial Efektivitas Pengawasan.....	68
Tabel IV.16 Hasil Uji F Simultan.....	69
Tabel IV.17 Hasil Uji Regresi.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk .

Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

DengandigantikannyaUndang-UndangonomidariUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 berubahmenjadiUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 makagerakPemerintah Daerah sudahsemakinbesardanluasdibandingkanpadamasasebelumnya.

Disinijelasbahwapemerintahdaerahberupayaasmaksimalmugkinuntukmenggalipot

ensi yang adadidaerahnya masing-masing Berlomba untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan hasil bumi yang tersedia. Begitu besar pengaruh perubahan Undang-Undang bagi Pemerintah Daerah. Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah adalah untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Berkaitan dengan itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Hal itu dimaksudkan agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.

Mengenai pengelolaan sumber daya alam maka daerah di beri kebebasan untuk mengelola sumber daya alam secara baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat oleh daerah. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya pendapatan asli daerah ini bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan poten

sidaerahsebagai perwujudandesentralisasi.Desentralisasiadalah pelimpahanwewena
ngpemerintahanpusatkepadapemerintahandaerah yang di
pilih oleh rakyat dalam daerah yang
bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapan sendiri mengurus urusa
n rumah tangganya sendiri. Atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang da
ri kebijaksanaan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasadapat dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan alam yang di pisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang di sah diantaranya :
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa giro
 3. Pendapatan bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 5. Komisi, potongan atau bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh
daerah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor publik ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat di tujukan dan digunakan untuk membiaya pengeluaran umum.

Diantara Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pajak daerah. Pajak ini adalah pajak daerah yang di pungut masyarakat di daerah tersebut yang bersangkutan. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu system perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat. Sehingga di jaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil. Sedangkan dikatakan bahwa pajak daerah harus padu dengan pajak nasional, terutama objek pajak dan tariff oajak yang ada.

Sehingga antara pusat dan pajak daerah saling melengkapi (Prof. Dr. Rahmat Soemitro, 1977:22).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan salah satu wujud kewajiban kenegaraan di tegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat seperti pajak harus di tetapkan Undang-Undang dengan adanya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Maka daerah berusaha untuk mencari Pendapatan Asli Daerahnya seperti pajak daerah.

Undang-Undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam melaksanakan pemungu

tanpa pajak dan retribusi. Serta menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya pedoman yang mengatur pajak daerah, maka daerah biasamemungut pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk sebuah kabupaten maka jenis-jenis pajak yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak, walaupun demikian, daerah kabupaten dapat memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah kabupaten tersebut di pandang kurang memadai, jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota adalah :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C
sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang
dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang

berkaitandenganpokokusahamaupundisedakanberkaitandenganpok
okusahamaupun yang di sediakansebagai suatuusaha

Disinisayamelihatbahwapajak hotel merupakanPendapatanAsli Daerah
yang sangatpotensialjikadikeloladenganbaik.Sayamenelitimengenaipajak hotel di
kabupaten Kampar.

Pajak Hotel adalahpajakatas pelayanan hotel.Dimana hotel adalahbangunan
yang khususdisediakanbagi orang
untukdapatmeninapatauistirahatdenganmemperolehpelayanan,
danaataufasilitaslainnyadengan di pungutbayarantermasukbangunan yang
menyatu, di keloladandimiliki olehpihak yang sama.
Kecualiuntukpertokoandanperkantoran.

Jelas sekali, bahwapajakmerupakanpungutandaerah yang
dimaksudkanuntukmembiayaipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunandaer
ah,
karenarealitaseluruhrangkaiankegiatanpemerintahdanpembangunantidakakante
rlepasdarituntutanbiaya yang sangatbesar,
disampingjugabiayaataudanamerupakanulangpunggunbagiterlaksananyaaktifitas
pemerintahdaerah.

PenerimaanPajak Daerah dalammenggalipotensiPendapatanAsli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar, adabeberapabentukpajak yang ada, diantaranya:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan atau Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Burung Walet
8. Pajak Hasil Budi daya Perikanan
9. Pajak Hasil Penangkapan Ikan

Salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang di pungut sebanyak sembilan jenis pajak daerah. Kabupaten Kampar memungut pajak hotel karena dianggap sangat potensial dan bisa meningkatkan PAD Kabupaten. Serta diharapkan bisa menambah keuangan dan kas daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar pada tahun Anggaran 2011 target 4.200.000.000, sedangkan realisasinya 4.178.825.000.

Penerimaan dari pajak hotel perlu diperludikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan melakukan pelaksanaan dan pengawasan pemungutan yang baik maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutannya dapat dihindari.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “

PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KAMPAR “

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar
- b. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh efektivitas sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang pelaksanaandanpengawasanpemungutanpajak hotel.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menentukankebijakan keuangan daerah.
- c. Diharapkan dapat sebagai bahan tambahan atau informasi yang bermanfaat sebagai referensi bagi penulis lain.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN HIPOTESA

Padababinipenulisakanmengemukakanteori yang melandasipembahasan yang berhubungandenganjudulpelitian,hipotesa, danvariabelpelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Padababinipenulisakanmengemukakantentanglokasipenelitian,
jenisdansumber data, populasidansampel,metodepengumpulan data
dananalisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalambabinipenulisakanmembuktikanhasilpenelitian yang telah di
lakukan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Padababinipenulisakanmemberikankesimpulandarihasilpenelitianda
n saran-saran yang perlu di kemukakan

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Efektifitas

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektifitas, diantaranya seperti yang di jelaskan sebagai berikut :

Menurut Anthoni, Dearden, & Bedford Seperti yang dimuat dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen oleh Agus Maulana (1999:245)

“Efektifitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Efektifitas atau pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu di lakukan (Kumorotomo 2005:362)

Efektifitas tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, baik itu dalam bentuk target.Sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi.(Septi Winarsih, Ratminto 2005:179)

Menurut Handoko (1998)

“Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentkan tujuan yang telah di tentukan.

Menurut Gaspez (dalam Skripsi Sri Rahyuni,2006:8)

Efektifitas merupakan suatu kerja dalam sebuah organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan kerja memiliki arahan yang dapat dan pencapaian hasil menjadi optimal.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2005:10)

“Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan efektif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan.

2.2 Pengertian Pajak

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definisi yang berbeda-beda.

Menurut Kesit pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk., (Kesit Bambang,2005:1).

Senada dengan itu Siti dalam bukunya berjudul Perpajakan:Teori DanKasus, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undangundangserta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagipengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masihterdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment.(Resmi, Siti.2004:2)

. Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiamenyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uangyang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepadanegara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989:658)

Menurut Andriani dalam Bohari, (2008 : 23) Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Smeeths dalam H Bohari, (2008 : 24) Pajak Adalah prestasi Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

(Soemahami Djaya, 2005 : 5)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003 : 9).

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

- a. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut
- b. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
- c. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.3 Fungsi Pajak

Negara mempunyai fungsi dan peranan yang mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Begitu pula dengan pajak memiliki fungsi yang penting diantaranya adalah :

a) Fungsi Budgeter atau pajak

Menurut Rochmat Soemitro dititik beratkan pada sektor public yang mengandung makna bahwa (Sumyar : 2004: 38-39)

b) Fungsi Deregulasi.

Fungsi pajak sebagai alat deregulasi, diarahkan pada pihak swasta dalam bahagian yang berfungsi sebagai bahagian pendukung dari investasi. Sehingga sangat berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menata dan memantapkan struktur ekonomi Indonesia.

Bentuk deregulasi pajak oleh pemerintah adalah sebagai berikut : Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal asing yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, pajak kedudukannya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam instrument deregulasi untuk mendorong peningkatan investasike Indonesia. Dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dan pembebasan pajak kepada perusahaan pemilik modal untuk mempermudah dalam investasi.

c) Fungsi Redistribusi

Pajak Berfungsi sebagai Redistribusi adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain demi terwujudnya keadilan sosial, wujud bentuk kembalinya dalam masyarakat melalui

APBN, pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan pra sarana yang mendukung pembangunan di Indonesia (Sumyar : 2004 :38-39)

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Bruton dalam buku Hukum Pajak, Yaitu:

1. Fungsi bugeter

Fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslatan manusi. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak member pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).

4. Fungsi distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.4 Cara Pengenaan Pajak

Cara Pengenaan Pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan berdasarkan atas stelsel-stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan pendapatan atau pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

2.5 Pajak Daerah

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menjelaskan bahwa:

“ Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Sedangkan pengertian Pajak Daerah Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah

“ Pajak Daerah adalah Iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah “

2.5.1 Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang pajak dan retribusi daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha.

2.5.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Sri Pudyat (2008: 36), Asas-asas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus di landasi dengan

asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “four canons taxation” atau sering disebut “The four Maxims” dengan uraian Sebagai berikut:

- a. Asas persamaan, Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.

Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas Persamaan ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.

- b. Asas Kepastian, Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
- c. Asas Menyenangkan, Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani,

sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

- d. Asas Efisiensi, Asas ini menekankan bahwa biaya Pemungutan Pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

2.6 Pajak Hotel

2.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau untuk istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. merujuk pada segala jenis penginapan. Sedangkan dalam arti sempit, hotel adalah sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk menyediakan penginapan bagi para perjalanan, dengan pelayanan makanan dan minuman (Denis L. Poster dalam Agus Sambodo dan Bagiono 2005:3)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang penyelenggaraan Kepariwisata Republik Indonesia Pada Pasal 61 dinyatakan bahwa "pelayanan pokok usaha hotel yang harus disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, penyediaan pelayanan pencucian pakaian dan penyediaan fasilitas lainnya. Peraturan tersebut secara implicit memberikan definisi mengenai kata hotel.

2.6.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Ahmad Yani (2002:51-52) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka panjang
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan sebagai fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel.

2.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel

Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan (Ahmad Yani,2002:250)

2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang di bayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif Pajak Hotel

Di sebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang di lakukan kepada hotel. Dan tarif pajak yang di tetapkan adalah sebesar 10 % dari nilai jual objek pajak (NOJP) dan ini ditetapkan dengan peraturan daerah atau kabupaten kota yang bersangkutan

3. Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang di hitung denagn cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang= Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada

Hotel.

2.6.5 Ketentuan Pidana Pajak Hotel

1. Wajib pajak yang Ku arena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atauata mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;

Tindakan pidana sebagaimana yang di maksud di atas tidak di tuntutan setelah melewati janga waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

2.6.6 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel

Proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang berlaku di Kabupaten Kampar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 43 Tahun 1999 Tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2002. Pelaksanaan pemungutan tersebut merupakan pedoman bagi aparat/unit kerja yang terkait dalam pengelolaan pajak daerah, serta sebagai upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dan tertib administratif pajak daerah. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel diawali dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel.

2.6.7 Pendaftaran Pajak Hotel

Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua,yaitu:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala Daerah, dilakukan dengan lagkah-langkah Sebagai Berikut:
 - a. Mempersiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak;
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak;
 - d. Mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak;

- b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak;
- c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak;
- d. Mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

2.6.8 Pendataan Pajak Hotel

Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pelaksanaan pendapatan Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan formulir pendataan /Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk Pajak Hotel;
 - b. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD;
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - d. Mengirim petugas untuk mengecek kebenaran data yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - e. Mencatat data Pajak Hotel dalam kartu data yang kemudian diserahkan kepada unit kerja bagian penetapan.

2. Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala Daerah, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Menyiapkan formulir pendataan/SPTPD untuk Pajak Hotel;

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- b. Mengirim petugas untuk mengecek kebenaran data yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- c. Mencatat data Pajak Hotel dalam Kartu data dan e dalam SPTPD untuk dibayar sendiri,

2.6.9 Penetapan Pajak Hotel

Pelaksanaan penetapan Wajib Pajak Hotel terbagi menjadi dua, yaitu;

1. Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak Hotel dengan cara penetapan Kepala Daerah, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Membuat nota perhitungan Pajak Hotel atas dasar kartu data;
- b. Menyerahkan kembali kartu data kepada unit yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan Pajak Hotel selesai;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. Mendistribusikan SKPD kepada Wajib Pajak, Seksi Pembukaan, Seksi Penagihan, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- e. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

2. Pelaksanaan penetapan Pajak Hotel dengan cara dibayar sendiri, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam kartu data;
 - b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

2.6.10 Pembayaran Pajak Hotel

Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dibayar secara lunas, dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel ke Bendaharawan Khusus Penerimaan;
- b. Wajib Pajak diberi tanda terima yang telah dicap lunas;
- c. Bendaharawan Khusus Penerimaan melakukan pencatatan kedalam buku pembantu penerimaan dan buku kas umum;

- d. Bendaharawan Khusus Penerimaan secara periodik setiap bulannya menyerahkan uang kepada Kas Daerah. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disertor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan

2.6.11 Angsuran Pajak Hotel

Angsuaran Pembayaran Pajak Hotel dilakukan dengan secara dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau yang kurang bayar, dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- 1. Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
- 2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadipenda);
- 3. Membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuaran yang ditandatangani oleh Kadipenda, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuat daftar surat perjanjian;
- 4. Menyerahkan Surat perjanjian angsuran kepada unit-unit terkait.

2.7 Pengertian Pendapatan

Ada beberapa pengertian tentang pendapatan, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Menurut Donald E.Keiso & J. Weygand yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dalam buku Akuntansi Intermediate

“Pendapatan adalah harus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama suatu periode”

Menurut SAK No.23 (IAI 2007:23.2) Tentang definisi pendapatan

“Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk aset/pemenuhan kewajiban dari penyerahan/produk barang, pemberian jasa dan aktivitas pencairan laba lainnya yang merupakan operasi yang utama/besar yang berkesinambungan selama suatu periode”

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (2003:153) dalam buku Teori Akuntansi Pengertian pendapatan adalah

“Pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999:233) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah:

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”

Selain menurut Committee On Accounting Concept and Standar dari AAA dikutip oleh Theodorus Tuanakotta (2000:144) dalam buku Teori Akuntansi memberikan definisi pendapatan adalah

“Pernyataan moneter mengenai barang dan jasa yang ditransfer perusahaan kepada langganan-langganannya dalam jangka waktu tertentu”

Paton dan Littleton mengemukakan bahwa pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan moneter. Hal ini juga dikemukakan Suwardjono (2000:167) dalam buku Teori Akuntansi Perakayasaan Keuangan bahwa dari aspek fisik pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Aspek moneter memberikan pengertian bahwa pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.

2.7.1 Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel

Salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah adalah dari Pajak Hotel. Yang mempunyai wewenang untuk memungut Pajak Hotel adalah Kabupaten/Kotamadya. Setiap Kabupaten/Kotamadya harus menetapkan target penerimaan pendapatan dari Pajak Hotel serta melaksanakan pemungutan dan pengawasannya secara optimal. Realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel akan tergantung dari proses pelaksanaan dan pengawasan pemungutannya.

Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel yang efektif adalah penerimaan pajak yang sesuai dengan target atau lebih dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya realisasi dari target yang ditetapkan maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan dapat dihindari.

2.7.2 Efektivitas pengawasan

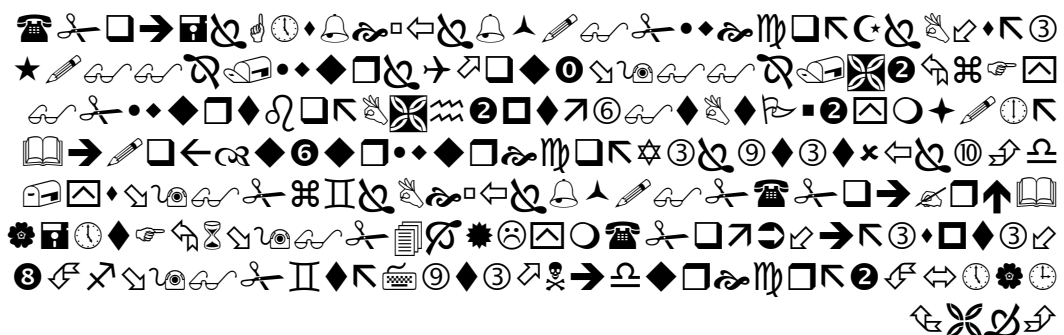
Efektivitas pengawasan adalah kemampuan atau pencapaian pengukuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan kerja yang memiliki arahan yang dapat dan pencapaian hasil menjadi optimal.

2.7.3 Efektivitas Pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan adalah Kemampuan atau pencapaian pengukuranyang dilaksanakan yang ber pedoman bagi unit/aparat yang terkait dalam suatu pengolahan yang berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan.

Pemungutan Pajak berdasarkan pada Al-quran:

Pada Surat At-Taubah Ayat 29



Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yng di haramkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberiakn AL-Kitab kepada mereka, sampai

mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Hadist yang berhubungan dengan perpajakan.

Allah subhanahuwa ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zalim atas diri-Nya, Juga atas segenap makhluk-Nya. Rasulullah SWT pernah bersabda

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَثْمَنَ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

artinya :

‘Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram (GR bukhari AL-buyu’)

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslim, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Sementara bagi mereka yang punya “uang” berbondong-bondong untuk mengasuransikan sebagian hartanya guna mendapat “pesangon” dimasa mendatang. Sungguh ironi, perbedaan penggunaan harta yang berkebalikan.

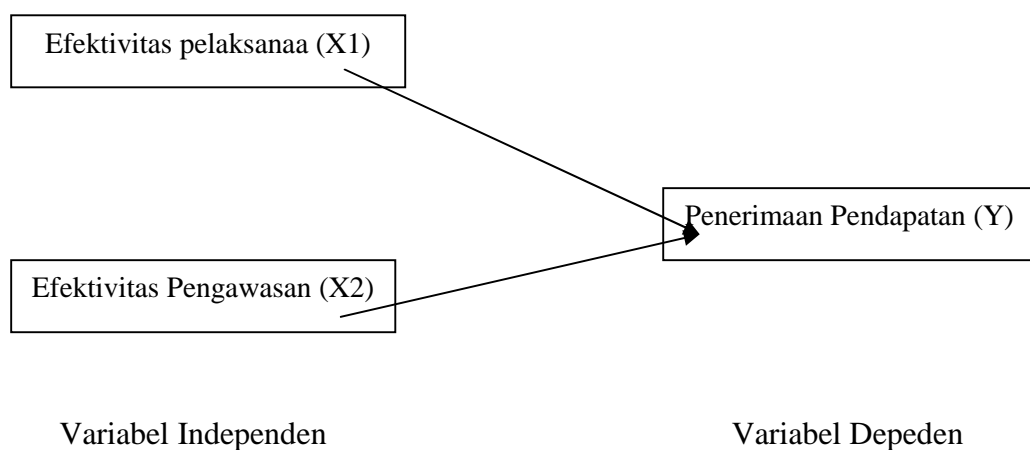
Apabila kita cermati, memang seolah tidak ada kaitannya antara pajak dengan asuransi. Namun dalam pembahasan ini, pemakalah memberikan informasi-informasi tentang kedua hal tersebut, semoga ada petunjuk yang bisa diambilnya. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak dan asuransi ditinjau

dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut, mudah-mudahan bermamfaat.

2.8 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Untuk mengetahui hubungan antara variabel depeden dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut ini :

Gambar I.I Model Penelitian



2.8.1 Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang masalah , Perumusan masalah dan landasan teoritis, maka hipotesis yang dapat penulis kemukakan adalah :

HI : Diduga efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kamapar

H2: Diduga efektifitas sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kampar

H3 : Diduga efektifitas pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak hotel mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kampar

2.8.2 Variabel Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan topik pembahasan di atas adapun variabel-variabel penelitian yang di ambil adalah, yaitu :

A. Variabel Independen

1. Efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel (X1)
2. Efektifitas pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel (X2)

B. Variabel Dependensi yaitu penerimaan pendapatan pajak hotel (Y)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat eksplansi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelesan dan pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkandari responden menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiono, 2005).

Berdasarkan tingkat eksplanasi dan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitati adalah kuesioner yang diberikan kepada responden berupa pertanyaan akan di beri nilai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan Keputusan Bupati Kampar NO.188.342/HK/199/2011 Tentang Penunjukan SKPD Pelaksanaan, Pengelolaan, penanggung jawab Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Bupati Kampar menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Sebagai pemungut Pajak Hotel, pajak Restoran dan pajak Reklame. Jadi Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Kampar yaitu Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan tentang pajak hotel yang terdaftar dalam kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupten Kampar. Mulai dari Februari 2012 samapai selesai.

3.3Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah bagian /sub yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel kantorDinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kampar. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*, yang menurut Hadi (dalam Gufron,2002:67) bahwa pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel inii dilakukan dengan cara menentukan berdasarkan tingkat jabatan dan criteria sudah 5 tahun mengabdi di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Populasi yang terlibat dalam hal ini yaitu seluruh pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan sample yang terlibat dalam hal ini adalah responden dari tiap jabatan sebagai objek penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia
- d. Sub Bagian Perencanaan
- e. Sub Bagian Kebudayaan
- f. Sub Bagian Keuangan
- g. Bidang pariwisata

- h. Seksi Seni Budaya
- i. Kelompok fungsional

Dengan Formulasi :

- a. Untuk jabatan kepala dinas 1 orang
- b. Untuk jabatan sekretaris 1 orang
- c. Untuk jabatan Sub Bagian Umum Dan Pegawaian 5 orang
- d. Untuk Sub Bagian Perencanaan 5 orang
- e. Untuk jabatan bagian keuangan 5 orang
- f. Untuk jabatan Bidang kebudayaan 5 orang
- g. Untuk jabatan bidang Pariwisata 5 orang
- h. Untuk Jabatan Seksi seni budaya 5 orang
- i. Untuk jabatan Kelompok fungsional 4 orang

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan laporan ini jenis yang penulis gunakan yaitu:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, penulis memperoleh Data Primer ini yaitu melakukan Observasi dan wawancara secara langsung.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi.

3.5 Metode Penelitian Data

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Yaitu suatu teknik yang merupakan komunikasi langsung dengan objek penelitian dimana Penulis langsung mengadakan pertanyaan dengan pihak yang ada hubungan dengan Penelitian ini.

b. Kuesioner (angket)

Yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dari jawaban itu diharapkan akan menemukan hubungan atau pengaruh antara variabel yang dianalisis. Kuesioner ini system penyebarannya dengan cara diantar langsung ke kantor dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kampar untuk di bagikan kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut.

3.6 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Mudjarad, (2003:123), menyatakan bahwa variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.

Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah

penerimaan pajak hotel sedangkan variabel independennya adalah efektifitas penerimaan dan efektifitas pemungutan.

1. Penerimaan pajak hotel (Y)

Salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah adalah dari Pajak Hotel. Yang mempunyai wewenang untuk memungut Pajak Hotel adalah Kabupaten/Kotamadya. Setiap Kabupaten/Kotamadya harus menetapkan target penerimaan pendapatan dari Pajak Hotel serta melaksanakan pemungutan dan pengawasannya secara optimal. Realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel akan tergantung dari proses pelaksanaan dan pengawasan pemungutannya.

Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel yang efektif adalah penerimaan pajak yang sesuai dengan target atau lebih dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya realisasi dari target yang ditetapkan maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga kemungkinan

Untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak hotel, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

2. Efektifitas penerimaan (X1)

Untuk mengukur seberapa besar efektifitas penerimaan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala

tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3. Efektifitas pemungutan

Untuk mengukur seberapa besar efektifitas pemungutan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.7.1 Uji Validitas dan Realibilitas

A. Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksi. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation product Moment*. Uji Validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam instrumen penelitian dapat menunjukkan variabel penelitian. Syarat yang ditentukan untuk menyatakan kesahihan tiap instrumen pengukur/atribut adalah :

pertama, bila skor tiap pernyataan berkorelasi positif dengan skor total.

Kedua, peluang ralat (p) maksimal 0,05

B. Uji Realibilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar (a) $<0,6$, tidak reliabel, (b) $0,6-0,7$ *acceptable*, (c) $0,7-0,8$ baik dan (d) $>0,8$ sangat baik.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2003:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametrik *kolmogorov-smirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari $0,05$ berarti data terdistribusi dengan normal.

B. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinearitas. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Menurut Ghazali (2005:91) multikolonearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai *VIF*>10.

C. Uji Heterokedestistik (Uji Park)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Park untuk melakukan uji Heteroskedastisitas. Park mengemukakan metode bahwa *variance* (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$s^2 = f(X)$$

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi :

$$\ln U^2_i = r + s \ln X_i + v_i$$

Karena s^2_i umumnya tidak diketahui maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_i sebagai proksi, sehingga persamaan sebagai berikut :

$$\ln U^2_i = r + s \ln X_i + v_i$$

Tingkat signifikan yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$ yang lazim digunakan dalam penelitian pada ilmu-ilmu sosial.

3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini pengujian hipotesisnya dengan menggunakan: Regresi Linear Berganda. Berikut ini adalah persamaan Regresi Linear berganda, dimana variabel dependennya adalah Penerimaan pendapatan pajak hotel (Y) variabel independennya ialah efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel (X1) dan efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel (X2).

B. Dengan persamaan

$$C. Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots H1$$

$$Y = a + b_2X_2 + e \dots\dots\dots H2$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots H3$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Penerimaan pendapatan pajak hotel)

X1, X2 = Variabel Bebas I, II (Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel)

a = Konstanta

b1 dan b2 = Koefisien Regresi

e = Galat (error)

Hipotesis I efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel diuji dengan menggunakan uji t (parsial),

Hipotesis II efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel system pengujiannya sama dengan hipotesis I yaitu uji t.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan efektifitas pengawasan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p_{value} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

Hipotesis III yaitu efektifitas pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel mempengaruhi pendapatan pajak hotel. Sistem pengujiannya menggunakan uji F (simultan). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah efektifitas pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel mempengaruhi pendapatan pajak hotel secara bersamaan.

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis telah menyebarkan kuesioner sebanyak 36 kuesioner kepada responden yaitu pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar, dan hasilnya dinyatakan reabilitas dan valid. Berikut penulis akan jabarkan hasil penelitian mengenai deskriptif dari masing-masing responden yang telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berikut ini merupakan daftar gambaran umum responden, terlihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Gambaran Umum Responden

Deskriptif	Jumlah	Persentase (%)
Umur responden		
- < 19 tahun	-	-
- < 20-30 tahun	13 orang	36,11
- < 31-41 tahun	12 orang	33,33
- < 41-50 tahun	9 orang	25
- > 51 tahun	2 orang	5,5
total	36 orang	100
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	24 Orang	66,67
- Perempuan	12 Orang	33,33
total	36 orang	100
Jabatan		
- Kepala Dinas	1 orang	2,78
- Sekretaris	1 orang	2,78
- Sub Bagian Umum dan kepegawaian	5 orang	13,89
- Sub Bagian		

- Keuangan	5 orang	13,89
- Sub bagian Perencanaan	5 orang	13,89
- Sub Bidang Kebudayaan	5 orang	13,89
- Sub Bidang Pariwisata	5 orang	13,89
- Sub seksi seni budaya	5 orang	13,89
- Kelompok Fungsional	4 orang	11,11
Total	36 orang	100

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel IV.1 terlihat bahwa gambaran umum mengenai umur responden sebagian besar berumur antara 20-30 tahun yaitu berjumlah 13 orang atau 36.11%, umur 31-40 sebanyak 12 orang atau 33,33%, umur 41-51 tahun sebanyak 9 orang atau 25%, umur 51 tahun keatas ada 2 orang atau 5,5% dan yang berumur 19 tahun kebawah tidak ada yang menjadi responden. Selanjutnya mengenai gambaran umum jenis kelamin responden, sebagian responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 24 orang atau 66,67% sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang atau 33,33%. Berikut mengenai gambaran umum jabatan dari responden kepala dinas 1 orang atau 2,78% Sekretaris 1 orang atau 2,78%, Sub Bagian Umum dan kepegawaian 5 orang atau 13,89%, Sub Bagian Keuangan 5 orang atau 13,89%, Sub bagian Perencanaan 5 orang atau 13,89%, Sub Bidang Kebudayaan 5 orang atau 13,89%, Sub Bidang Pariwisata 5 orang atau 13,89%, Sub seksi seni budaya 5 orang atau 13,98%, Kelompok Fungsional 4 Orang 11.11%.

4.2 Analisa Efektivitas Pelaksanaan

Faktor efektivitas pelaksanaan pada penelitian ini adalah dengan kuesioner menggunakan skala likert dengan jawaban 5 tingkatan yaitu:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Berikut tanggapan responden mengenai efektivitas pelaksanaan yang terdiri dari 8 butir pertanyaan dengan 36 responden, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2

Tanggapan responden tentang efektivitas pelaksanaan

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden					Persentase (%)
		SS	S	N	TS	STS	
1	Saya selalu membuat daftar teguran kepada wajib pajak setelah surat peringatan dikeluarkan sejak 7 (hari) sejak jatuh tempo pembayaran	10	26	-	-	-	100
2	Saya selalu membuat dan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak setelah surat peringatan dikeluarkan sejak 7 (hari) sejak jatuh tempo pembayaran	16	20	-	-	-	100

3	Saya sering membuatkan daftar surat paksa untuk wajib pajak yang telah lewat waktu 21 hari setelah tanggal surat peringatan belum menyetor pajak terutang	7	20	7	2		100
4	Saya sering melakukan proses penagihan dengan surat teguran kepada wajib pajak yang malas membayar pajak	10	21	-	3	2	100
5	Saya selalu melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan wajib pajak dalam rangka mencapai target realisasi pajak hotel	5	21	7	3	-	100
6	Saya sering melakukan proses penagihan dengan surat paksa jika surat teguran tidak di indahkan oleh wajib pajak	10	11	11	4	-	100
7	Saya sering melakukan proses pengihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan jika surat paksa tidak di indahkan oleh wajib pajak.	3	19	10	4	-	100
8	Saya selalu melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan wajib pajak dalam rangka mencapai target realisasi pajak hotel	13	16	5	-	2	100

Sumber : Data Olahan

4.3 Analisa Efektivitas Pengawasan

Faktor efektivitas pengawasan pada penelitian ini adalah dengan kuesioner menggunakan skala likert dengan jawaban 5 tingkatan yaitu :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Berikut tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan yang terdiri dari 8 butir pertanyaan dengan 36 responden, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.3
Tanggapan responden tentang efektivitas pengawasan

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden					Persentase (%)
		SS	S	N	TS	STS	
1	Saya selalu melakukan pengawasan terhadap wajib pajak	15	19	1	1	-	100
2	Saya selalu melakukan pemeriksaan secara mendadak kepada wajib pajak yang belum membayar pajak pemantauan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pemungutan pajak	9	23	1	3	-	100
3	Saya melakukan pemantauan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pemungutan pajak	19	16	1	-	-	100
4	Saya selalu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penunggak pajak dan terhadap aparatur yang melanggar aturan	14	21	-	1	-	100
5	Saya selalu meningkatkan pengawasan dalam pelayanan terhadap wajib pajak	27	8	1	-	-	100
6	Saya selalu menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel	14	21	1	-	-	100
7	Saya selalu melakukan pengendalian dan pengawasan dalam proses pemungutan pajak terhadap wajib pajak dilapangan	11	24	1	-	-	100
8	Saya selalu melakukan	22	13	1	-	-	100

	pengendalian dan pengawasan terhadap petugas pajak yang bertugas dilapangan						
--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Olahan

4.4 Analisa Penerimaan

Faktor penerimaan pada penelitian ini adalah dengan kuesioner menggunakan skala likert dengan jawaban 5 tingkatan yaitu :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Berikut tanggapan responden mengenai penerimaan yang terdiri dari 8 butir pertanyaan dengan 36 responden, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.4

Tanggapan responden tentang penerimaan

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden					Persentase (%)
		SS	S	N	TS	STS	
1	Saya selalu menetapkan target-target pendapatan pajak hotel	4	28	3	1	-	100
2	Saya selalu melakukan penerimaan pajak yang sesuai dengan target dari yang telah ditetapkan sebelumnya	23	12	1	-	-	100
3	Saya selalu melibatkan bagian lapangan dalam menentukan target-target pendapatan yang akan dicapai karena mereka	13	26	-	-	-	100

	lebih memahami secara langsung objek pajak						
4	Saya selalu membuat program-program untuk memotivasi wajib pajak agar taat membayar pajak	22	14	-	-	-	100
5	Saya sering melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perhotelan dalam rangka mencapai target pajak hotel	17	18	1	-	-	100
6	Saya sering memberikan proses yang mudah dalam membayar pajak hotel dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel	24	12	-	-	-	100
7	Saya sering melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadinya kebocoran dalam proses pemungutan pajak yang akan mengakibatkan target pajak tidak teralisasi	27	19	-	-	-	100
8	Saya sering melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak yang telah diterima, apakah penerimaan sesuai dengan mekanisme perhitungan pajak hotel	15	21	-	-	-	100

Sumber : Data Olahan

4.5 Analisa Kualitas Data

Pada tahap ini adalah tahap yang dilakukan penulis sebelum data diolah dengan metode statistik yang sesuai. Pengujian dilakukan pada setiap pertanyaan yang ada dalam masing-masing faktor.

4.5.1 Statistik Deskriptif

Untuk masing-masing variabel terdapat pada Tabel IV.5 berikut: Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi dari satu variabel dependen yaitu Penerimaan. Dan dua variabel independen yaitu efektivitas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data. Statistik deskriptif menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Distribusi statistik deskriptif

Tabel IV.5
Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	36	25.00	36.00	31.7222	3.39421
EFEKTIVITAS PENGAWASAN	36	28.00	39.00	35.1944	2.50507
PENERIMAAN	36	10.00	38.00	34.7778	4.89963
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan tabel IV.5 terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap efektivitas pengawasan mempunyai nilai minimum sebesar 25, dan nilai maksimum 36, dan nilai rata-rata sebesar 31,71222. Efektivitas pengawasan

mempunyai nilai rata-rata sebesar 35,1944 dan pelaksanaan mempunyai nilai rata-rata sebesar 34,7778.

4.5.2 Uji Validasi dan Uji Realibilitas Efektifitas Pelaksanaan

Efektifitas pelaksanaan dinyatakan dalam 8 butir pertanyaan yang dinyatakan dalam skala likert, output dari pengujian validasi dan reabilitas dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah :

Tabel IV.6

Validasi dan Realibilitas Efektivitas Pelaksanaan

Item pertanyaan	r hitung	Koefisien Alpha	R tabel
Butir pertanyaan 1	0,330	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 2	0,516	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 3	0,550	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 4	0,771	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 5	0,610	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 6	0,617	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 7	0,457	0,7873	0,329
Butir pertanyaan 8	0,572	0,7873	0,329

Sumber : Data Olahan

A. Langkah Uji Validasi

Langkah dalam menguji validasi butir pertanyaan dalam Efektivitas pelaksanaan tersebut adalah :

1. Menguji butir-butir pertanyaan terhadap efektivitas pelaksanaan. Untuk mengujinya perlu dibuat suatu hipotesa sebagai berikut

H_0 = Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor efektifitas pelaksanaan.

H_1 = Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan efektivitas pelaksanaan.

2. Menguji nilai r tabel

Untuk menentukan r tabel perlu di tentukan terlebih dahulu nilai df. Seperti telah diketahui $df = \text{jumlah kasus} - 2$, $df = 36$ jadi dalam penelitian ini $df = 34$, dan tingkat signifikan 5 % di peroleh angka 0,329.(dilihat dari tabel yang dapat mencari r tabel dengan uji dua sisi)

3. Mencari r hitung

Dari tabel IV.6 diatas, dapat dilihat bahwa r hitung untuk butir pertanyaan 1 adalah 0,329, untuk butir pertanyaan 2 adalah 0,516, untuk butir pertanyaan 3 adalah 0,550, untuk butir pertanyaan 4 adalah 0,711, untuk butir pertanyaan 5 adalah 0,610, untuk butir pertanyaan 6 adalah 0,617, untuk butir pertanyaan 7 adalah 0,457, untuk butir pertanyaan 8 adalah 0,572.

4. Keputusan

Valid tidaknya suatu pertanyaan dilihat dari perbandingan nilai r tabel dengan nilai r hitung. Apabila nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan Valid. Dari tabel IV.6 diatas bisa dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan sudah dapat dikatakan valid.

B. Langkah-langkah untuk menguji realibilitas

1. Menentukan hipotesa sebagai berikut :

H_o = Skor butir berkorelasi positif dengan komposif faktornya

H_i = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan komposif faktornya

2. Menentukan nilai r tabel

Untuk $df = 34$ dan tingkat signifikan 5% maka diperoleh angka 0,329

(dilihat dari r tabel dengan uji dua sisi pada sebuah tabel r)

3. Dari tabel IV.6 diatas, bisa dilihat bahwa r_{Alpha} adalah 0,7873

4. Keputusan

Seperti yang diketahui apabila nilai $r_{Alpha} >$ nilai r tabel maka butir pertanyaan dikatakan reliabel. Karna r_{Alpha} yang dihasilkan (0,7873) lebih besar dari r tabel (0,329), maka butir pertanyaan tersebut reliable. Dengan demikian pengujian validitas dan realibilitas untuk butir-butir pertanyaan dalam efektivitas pelaksanaan sudah selrsai.

4.5.3 Uji Validasi dan realibilitas Efektivitas Pengawasan

Efektifitas pengawasan dinyatakan dalam 8 butir pertanyaan yang dinyatakan dalam skala likert, out put dari pengujian validasi dan reabilitas dapat dilihat pada tabel IV.7 dibawah :

Tabel IV.7

Validasi dan Realibilitas Efektivitas Pengawasan

Item pertanyaan	r hitung	Koefisien <i>Alpha</i>	R tabel
Butir pertanyaan 1	0,679	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 2	0,470	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 3	0,703	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 4	0,524	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 5	0,574	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 6	0,592	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 7	0,592	0,7946	0,329
Butir pertanyaan 8	0,620	0,7946	0,329

Sumber : Data Olahan

A. Langkah Uji Validasi

Langkah dalam menguji validasi butir pertanyaan dalam Efektivitas pengawasan tersebut adalah :

1. Menguji butir-butir pertanyaan terhadap efektivitas pengawasan. Untuk mengujinya perlu dibuat suatu hipotesa sebagai berikut

Ho = Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor efektifitas pengawasan

Hi = Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan efektivitas pengawasan

2. Menguji nilai r tabel

Untuk menentukan r tabel perlu di tentukan terlebih dahulu nilai df. Seperti telah diketahui $df = \text{jumlah kasus} - 2$, $df = 36$ jadi dalam penelitian ini $df = 34$, dan tingkat signifikan 5 % di

peroleh angka 0,329 (dilihat dari tabel yang dapat mencari r tabel dengan uji dua sisi)

2. Mencari r hitung

Dari tabel IV.7 diatas, dapat dilihat bahwa r hitung untuk butir pertanyaan 1 adalah 0,679, untuk butir pertanyaan 2 adalah 0,470, untuk butir pertanyaan 3 adalah 0,730, untuk butir pertanyaan 4 adalah 0,524, untuk butir pertanyaan 5 adalah 0,574, untuk butir pertanyaan 6 adalah 0,592, untuk butir pertanyaan 7 adalah 0,592, untuk butir pertanyaan 8 adalah 0,620.

3. Keputusan

Valid tidaknya suatu pertanyaan dilihat dari perbandingan nilai r tabel dengan nilai r hitung. Apabila nilai r hitung > nilai r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan Valid. Dari tabel IV.7 diatas bisa dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan sudah dapat dikatakan valid.

B. Langkah-langkah untuk menguji realibilitas

1. Menentukan hipotesa sebagai berikut :

H_o = Skor butir berkorelasi positif dengan komposif faktornya

H_i = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan komposif faktornya

2. Menentukan nilai r tabel

Untuk $df = 34$ dan tingkat signifikan 5% maka diperoleh angka 0,329 (dilihat dari r tabel dengan uji dua sisi pada sebuah tabel r)

3. Dari tabel IV.7 diatas, bisa dilihat bahwa r *Alpha* adalah 0,7946

4. Keputusan

Seperti yang diketahui apabila nilai r *Alpha* > nilai r tabel maka butir pertanyaan dikatakan reliabel. Karna r *Alpha* yang dihasilkan (0,7946) lebih besar dari r tabel (0,329), maka butir pertanyaan tersebut reliable. Dengan demikian pengujian validitas dan realibilitas untuk butir-butir pertanyaan dalam efektivitas pelaksanaan sudah selesai.

4.5.4 Uji Validitas dan Uji Realibilitas Penerimaan

Penerimaan dinyatakan dalam 8 butir pertanyaan yang dinyatakan dalam skala likert, out put dari pengujian validasi dan reabilitas dapat dilihat pada tabel IV.8 dibawah :

Tabel IV.8

Validasi dan Realibilitas Penerimaan

Item pertanyaan	r hitung	Koefisien <i>Alpha</i>	R tabel
Butir pertanyaan 1	0,664	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 2	0,425	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 3	0,755	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 4	0,686	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 5	0,471	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 6	0,382	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 7	0,508	0,7426	0,329
Butir pertanyaan 8	0,612	0,7426	0,329

Sumber : Data Olahan

A. Langkah Uji Validasi

Langkah dalam menguji validasi butir pertanyaan dalam Penerimaan tersebut adalah :

1. Menguji butir-butir pertanyaan terhadap Penerimaan Untuk mengujinya perlu dibuat suatu hipotesa sebagai berikut

Ho = Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor penerimaan

Hi = Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan penerimaan

2. Menguji nilai r tabel

Untuk menentukan r tabel perlu di tentukan terlebih dahulu nilai df. Seperti telah diketahui $df = \text{jumlah kasus} - 2$, $df = 36$ jadi dalam penelitian ini $df = 34$, dan tingkat signifikan 5 % di peroleh angka 0,329 (dilihat dari tabel yang dapat mencari r tabel dengan uji dua sisi)

4. Mencari r hitung

Dari tabel IV.8Diatas, dapat dilihat bahwa r hitung untuk butir pertanyaan 1 adalah 0,664, untuk butir pertanyaan 2 adalah 0,425, untuk butir pertanyaan 3 adalah 0,755, untuk butir pertanyaan 4 adalah 0,686, untuk butir pertanyaan 5 adalah 0,471, untuk butir pertanyaan 6 adalah 0,382, untuk butir pertanyaan 7 adalah 0,508, untuk butir pertanyaan 8 adalah 0,612.

5. Keputusan

Valid tidaknya suatu pertanyaan dilihat dari perbandingan nilai r tabel dengan nilai r hitung. Apabila nilai r hitung > nilai r tabel maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan Valid. Dari tabel IV.8 diatas bisa dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan sudah dapat dikatakan valid.

B. Langkah-langkah untuk menguji realibilitas

1. Menentukan hipotesa sebagai berikut :

H_o = Skor butir berkorelasi positif dengan komposif faktornya

H_i = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan komposif faktornya

2. Menentukan nilai r tabel

Untuk $df = 34$ dan tingkat signifikan 5% maka diperoleh angka 0,329 (dilihat dari r tabel dengan uji dua sisi pada sebuah tabel r)

3. Dari tabel IV.8 diatas, bisa dilihat bahwa r_{Alpha} adalah 0,7462

4. Keputusan

Seperti yang diketahui apabila nilai $r_{Alpha} >$ nilai r tabel maka butir pertanyaan dikatakan reliabel. Karna r_{Alpha} yang dihasilkan (0,7462) lebih besar dari r tabel (0,329), maka butir pertanyaan tersebut reliable. Dengan demikian pengujian validitas dan realibilitas untuk butir-butir pertanyaan dalam efektivitas pelaksanaan sudah selesai.

4..6 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria uji adalah jika setiap variabel individu menghasilkan K-S-Z dengan $P > 0,05$ maka data dapat dikatakan normal dan sebaliknya. Seperti data IV.9

Tabel IV.9
Normalitas Data awal
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	EFEKTIVITAS PENGAWASAN	PENERIMAAN
N		36	36	36
Normal Parameters ^a	Mean	31.7222	35.1944	34.7778
	Std. Deviation	3.39421	2.50507	4.89963
Most Extreme Differences	Absolute	.147	.209	.255
	Positive	.104	.124	.255
	Negative	-.147	-.209	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		.880	1.257	1.532
Asymp. Sig. (2-tailed)		.421	.085	.018
a. Test distribution is Normal.				

Sumber : Data Olahan

Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 36 data menunjukkan bahwa ada satu variabel belum berdistribusi normal (signifikansi di bawah 0,05). Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pengujian Kolmogorov - Smirnov tersebut lebih kecil dari 0,05.

Karena analisis regresi mensyaratkan adanya data yang berdistribusi normal, maka dengan demikian penormalan data dilakukan diantaranya adalah dengan meng LN (Natural Logaritma) data-data. Hasil pengujian selanjutnya diperoleh sebagai berikut :

Tabel IV.10
Normalitas Data Yang di LN
Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47793443
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.063
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.536
Asymp. Sig. (2-tailed)		.936

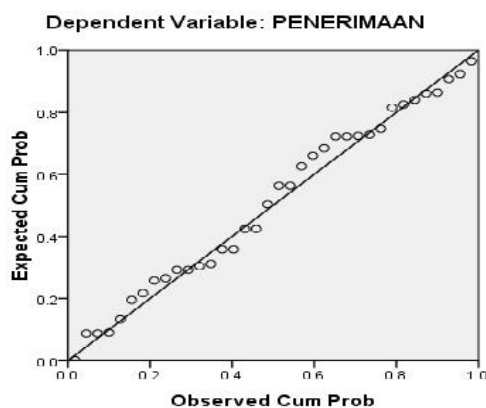
a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Olahan

Hasil pengujian normalitas pada pengujian yang di LN kan data menunjukkan bahwa seluruh variabel sudah berdistribusi normal yang ditunjukkan nilai signifikansi pengujian Kolmogorov Smirnov tersebut lebih besar dari 0,05.

Gambar IV.1
Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Olahan

Hasil pengujian normalitas residual menunjukkan sudah berdistribusi normal yang ditunjukkan nilai signifikansi pengujian Kolmogorov Smirnov tersebut lebih besar dari 0,05.

4.7 Uji Asumsi Klasik

4.7.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui adanya interkolerasi antara variabel indenpenden yang terdapat dalam model regresi penelitian. Pengujiannya yang diperoleh melalui SPSS dapat dilihat pada tabel IV.11

Tabel IV.11
Uji Multikolinearitas
Coefficients (a)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.833	1.578		3.697	.001		
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	-.101	.082	-.186	-1.226	.229	.851	1.175
EFEKTIVITAS PENGAWASAN	.605	.144	.640	4.212	.000	.851	1.175

Sumber : Data Olahan

Suatu model regresi dikatakan bebas multikol apabila :

a. Besaran VIF (*Variance Inflation Faktor*) dan *Tolerance*

1. Mempunyai nilai VIF disekitar 1

2. Mempunyai angka Tolerance mendekati 1
- b. Besar korelasi antara variabel indenpendent.

Dari tabel IV.11 diatas terlihat bahwa masing-masing variabel indenpenden memiliki angka VIF disekitar angka 1. Dengan demikian pula nilai Torelance mendekati nilai 1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

4.7.2 Uji Auto Kolerasi

Uji Auto Kolerasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbi Wasson* Test, dengan criteria $Du < d < 4-du$ maka tidak terdapat auto kolerasi dan sebaliknya. Seperti dilihat pada tabel IV.12

Tabel IV.12

Uji Auto Kolerasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.593 ^a	.352	.313	.49220	.352	8.966	2	33	.001	2.275

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.12 diatas dapat dilihat bahwa DW statistic berada pada angka 2,275, tabel nilai $du < d < 4-du$ adalah $1,5872 < 2,275 < 2,4128$. Artinya model penelitian ini sudah bebas dari gejala auto korelasi dikatakan auto korelasi apabila muncul apabila muncul observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

4.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya gangguan heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji park, kriteria uji park ini adalah apabila masing-masing variabel indenpendennya angka singnifikannya diatas 0,05 dan sebaliknya seperti yang dilihat di tabel IV.13

Tabel IV.13
Uji Park
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.818	5.745		.665	.516
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	-.249	.325	-.210	-.765	.455
EFEKTIVITAS PENGAWASAN	-.211	.554	-.104	-.380	.709

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel IV.13 diatas menunjukkan bahwa semua variabel indenpenden menghasilkan angka signifikannya diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model penelitian ini.

4.8 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.8.1 Uji T (Parsial)

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

1. Hipotesis ke satu menyatakan bahwa pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar dari hasil uji parsial hipotesa I diterima. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel IV.14 dibawah ini.

Tabel IV.14
Uji T Parsial Efektivitas Pelaksanaan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.833	1.578		3.697	.001
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	-.101	.082	-.186	-1.226	.004

Sumber : Data Olahan

Pada tabel diatas jelas bahawa efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh pendapatan pajak hotel karna apabila pelaksanaan pemungutan pajak hotel ini apabila dilaksanakan secara aturan maka hasilnya akan maksimal jika pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilaksanakan tidak secara beraturan maka hasilnya juga akan tidak maksimal memang untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan setidaknya ada kerjasama antara objek dan subjek pajak dalam pemungutan pajak hotel. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan pajak hotel terdapat pendapatan berpengaruh.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi (2009).yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh pendapatan pajak hotel.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengaruh efektivitas pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pemungutan pajak hotel di kabupaten Kampar dari hasil uji parsial hipotesa II diterima. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Seperti yang dijelaskan pada tabel IV.15.

Tabel IV.15
Uji T parsial Efektivitas pengawasan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.833	1.578		3.697	.001
EFEKTIVITAS PENGAWASAN	.605	.144	.640	4.212	.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar berpengaruh karena apabila pengawasan pemungutan pajak hotel dilaksanakan secara efektif maka akan mempengaruhi pendapatan pajak hotel tersebut secara signifikan dan sebaliknya apabila pengawasan pemungutan pajak hotel tersebut tidak dilakukan secara efektif maka secara signifikan pula berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel. Oleh sebab itu perlu didukung oleh semua pihak agar pengawasan pemungutan pajak hotel ini akan berjalan dengan efektif. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa efektivitas pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak terhadap pendapatan berpengaruh.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi (2009). yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel.

4.8.2 Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

Tabel IV.16
Uji F (Simultan)
ANOVA (b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.344	2	2.172	8.966	.001 ^a
	Residual	7.995	33	.242		
	Total	12.339	35			

Sumber : Data Olahan

Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui berpengaruh secara bersamaan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kata lain untuk melihat pengaruh efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar secara bersamaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar. Hal ini di buktikan dengan angka signifikan $0,001 < 0,05$.

(dapat dilihat pada tabel diatas). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pengawasan pelaksanaan pemungutan pajka hotel terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar.

4.9 Koefisien Regresi

Pada tabel IV.17 ini akan meenjelaskan tentang Koefisien Regresi.

Tabel IV.17
Regresi
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.833	1.578		3.697	.001
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	-.101	.082	-.186	-1.226	.904
EFEKTIVITAS PENGAWASAN	.605	.144	.640	4.212	.014

Sumber : Data Olahan

Dimana standar koefisien dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,5833 + 0,186 x_1 + 0,640 x_2$$

Penjelasannya adalah :

1. Konstanta Uji Simultan sebesar 0,5833 yang berarti variabel efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel.
2. Koefisien regresi 0,186 menyatakan bahwa efektivitas melaksanakan pemungutan pajak hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel sebesar 18,6 %.

3. Koefisien regresi 0,640 menyatakan bahwa efektivitas melaksanakan pengawasan pemungutan pajak hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel sebesar 64,0%

.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini pembahasan atau rumusan masalah adalah dengan ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji validasi dan realibilitas seluruh butir pertanyaan dengan menggunakan alat uji menunjukan bahwa setiap butir pertanyaan pada efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar memiliki tingkat validasi yang baik sebesar 0,7873 dan hasil pengujian validasi dan reabilitas seluruh butir pertanyaan dengan menggunakan alat uji menunjukan bahwa setiap butir pertanyaan pada efektivitas pengawasan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan di Kabupaten Kampar memiliki tingkat validasi yang baik sebesar 0,7946, pengujian validasi dan reabilitas terhadap seluruh pertanyaan menggunakan uji *Korelasi Person*.
2. Secara teori penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika F

hitung > F_{tabel} atau $P_{\text{value}} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar sebesar 0,186 atau 18,6 %. Dan hasil dan pembahasan secara uji t parsial bahwa efektivitas sistem pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar sebesar 0,640 atau 64,0%. Ini berarti bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap pendapatan Kabupaten Kampar.

3. Secara teori penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat nilai P_{value} masing-masing variabel, sehingga dapat ditemukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Kriteria pengujian ini adalah jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $P_{\text{value}} < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Dari hasil dan pembahasan secara uji f simultan secara bersama bahwa efektivitas pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pendapatan pajak hotel. Ini berarti bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di

Kabupaten Kampar berpengaruh dalam artian bahwa setiap pemungutan dan pengawasannya apabila dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap sebuah pendapatan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kampar.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dengan ini penulis akan mencoba memberikan saran kepada pihak yang terkait dimana yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar :

1. Dinas pariwisata dan kebudayaan perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
2. Dinas pariwisata dan kebudayaan perlu meningkatkan pengawasan pemungutan Pajak Hotel dengan menambah jumlah petugas lapangan sehingga kebocoran dalam pemungutan pajak dapat dihindari.
3. Dinas pariwisata dan kebudayaan perlu mensosialisasikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang taat pajak.

5.3 Keterbatasan

1. Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi, sehingga gambaran hasil penelitian ini tidak merepresentasikan keadaan secara umum Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Sedikitnya jumlah sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini disebabkan karena keterbatasan dana untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak.

2. Rentang periode pengamatan dalam pengamatan dalam penelitian ini terlalu singkat sehingga penelitian yang telah dilakukan belum memberikan gambaran yang maksimal. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan dana dalam penelitian.
3. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan secara keseluruannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'an Surat At-Taubah Ayat 29

Gaspez, Dalam Skripsi Sri wahyuni, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Jurusan Menjahit* di BPTK Peknabaru 2006

Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gufron, M. Nur, 2002, *Hubungan Kontrol Diri dan Persepsi Remaja Terhadap Penerapan Disiplin Orang Tua dengan Prokrastinasi Akademik pada Madrasah Aliyah di Wilayah Kota Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada, tesis tidak diterbitkan.

Hasibuan, Melayu S.P. 1999. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Haji Mas Agung. Jakarta.

Handoko. T. Hani. 2000. *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Perilaku*. BPFE. Yogyakarta.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

I Nyomaman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta, Citra Utama, 2005.

Keputusan Bu Suandy, Erly. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Kumorotomo, Wahyudi, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo, 1999. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi

Maulana, Agus. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Muqodim, Akuntan, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pembaharuan Perpajakan Nasional*, 1999.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

P. Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

R. Santoso Brotodiharjo, R. Santoso. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pajak*, Bandung: PT. Eresco.

- Ratminto, Septi Winarsih. 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Soetrisno, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, cetakan 2, penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1999.
- S Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Subiyakno Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, PT Usaha Nasional, Surabaya, 1999.
- Weygandt, Kieso. 2000. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.